

ABSTRAK

Alih fungsi lahan pertanian telah menjadi ancaman terhadap pangan dan keseimbangan ekologis, sementara upaya kebijakan konvensional terbukti tidak efektif di Kota Padang. Kegagalan ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara desain kebijakan dan realitas perilaku masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi keputusan strategi pengendalian alih fungsi lahan pertanian oleh pemerintah melalui kerangka kerja *nudging*. Menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, analisis dokumen, dan observasi, kemudian dianalisis menggunakan bantuan MAXQDA 2020 secara tematik berdasarkan tiga dimensi *nudging*, paternalisme libertarian, *default option & framing*, serta bias kognitif dan norma sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan pemerintah belum secara sistematis mengimplementasikan intervensi *nudging* yang ideal, meskipun beberapa praktik awal teridentifikasi. Implikasi temuan ini adalah bahwa strategi yang ada saat ini akan terus gagal karena tidak selaras dengan realitas perilaku, sosial budaya dan bias ekonomi masyarakat. Secara signifikan, penelitian ini mengidentifikasi munculnya model *nudging* organik yang tertanam dalam kearifan lokal, sebuah sumber daya kebijakan yang dapat menjadi model kebijakan *nudging* pemerintah dalam pengendalian alih fungsi lahan pertanian. Rekomendasi utama mendesak Pemerintah Daerah Kota Padang untuk bertransformasi dari paradigma birokrasi konvensional menjadi seorang arsitek pilihan yang merancang kebijakan dengan mengintegrasikan wawasan perilaku untuk mengarahkan keputusan penggunaan lahan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Alih Fungsi Lahan, Nudging, Perilaku Administrasi Publik*

ABSTRACT

Land conversion has become a threat to food security and ecological balance, while conventional policy efforts have proven ineffective in Padang City. This failure highlights a gap between policy design and the actual behavior of the community. This study aims to evaluate the government's strategic decisions on controlling land conversion through a nudging framework. Using a qualitative case study approach, data were collected through in-depth interviews with representatives from the government, private sector, and community, as well as through document analysis and observation. The data were then analyzed using MAXQDA 2020, thematically based on three dimensions of nudging, libertarian paternalism, default options, and framing, as well as cognitive bias and social norms. The results of the study show that the government's decision-making process has not systematically implemented ideal nudging interventions, although some initial practices have been identified. These findings imply that current strategies will continue to fail because they are not aligned with the behavioral, socio-cultural, and economic biases of society. Significantly, this study identifies the emergence of an organic nudging model embedded in local wisdom, a policy resource that can serve as a model for government nudging policies in controlling agricultural land conversion. The main recommendation urges the Padang City Government to transform from a conventional bureaucratic paradigm to a choice architect who designs policies by integrating behavioral insights to guide land use decisions more effectively and sustainably.

Keywords: *Land Use Change, Nudging, Public Administration Behaviour*